

PENYUSUNAN DATA BLT DESA/KELURAHAN KECAMATAN NAINGGOLAN DALAM PENGELOLAAN INFORMASI BANTUAN SOSIAL

Jhon B.J. Situmorang¹, Martin Luter Purba²

^{1,2}Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen, Medan

E-mail: jhon.situmorang@student.uhn.ac.id¹, martin.purba@uhn.ac.id

Abstract

This study examines the compilation of village-level Direct Cash Assistance (BLT) data as an efficiency measure in managing social assistance information in Nainggolan Sub-district. The topic was chosen due to problems of inconsistent data formats and incomplete recipient identities, which complicate administrative processes. The method applied is descriptive qualitative, utilizing physical documents as secondary administrative data that were reorganized, validated, merged, and standardized using Microsoft Excel. The findings indicate that BLT data can be organized more neatly, documented, and consistent, while also providing an overview of variations in compliance among villages. In conclusion, BLT data compilation is a strategic step to improve efficiency in information social assistance management, and opens opportunities for digital governance development at the village level.

Keywords: *BLT data compilation, public administration efficiency, village format standardization, digital governance*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyusunan data Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa/kelurahan sebagai langkah efisiensi dalam pengelolaan informasi bantuan sosial di Kecamatan Nainggolan. Topik ini dipilih karena masih terdapat masalah berupa ketidakseragaman format data dan ketidaklengkapan identitas penerima, yang menyulitkan proses kompilasi dan validasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan dokumen fisik sebagai data sekunder administratif yang kemudian ditata ulang, divalidasi, digabungkan, dan distandarisasi menggunakan Microsoft Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data BLT dapat disusun lebih rapi, terdokumentasi, dan konsisten, sekaligus memberikan gambaran variasi kepatuhan antar desa. Kesimpulannya, penyusunan data BLT merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi bantuan sosial, serta membuka peluang pengembangan tata kelola digital di tingkat desa.

Kata Kunci: *Pendataan BLT, efisiensi administrasi publik, data, standarisasi format desa, digitalisasi tata kelola*

PENDAHULUAN

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan instrumen kebijakan sosial yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial langsung kepada masyarakat miskin dan rentan. Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, BLT terus mengalami

penyesuaian kebijakan seiring dengan tuntutan efisiensi administrasi dan akurasi pendataan penerima. Hingga kini, BLT tetap relevan sebagai bagian dari perlindungan sosial, dengan landasan hukum terbaru yaitu Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 239/HUK/2025 yang menekankan pentingnya pendataan penerima secara akurat, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif kebijakan sosial, BLT memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Titmuss (1974) menekankan bahwa kebijakan sosial merupakan instrumen pemerataan kesejahteraan, di mana intervensi pemerintah melalui bantuan langsung dapat mengurangi ketimpangan struktural yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sen (1999) melalui konsep *Development as Freedom* menegaskan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai perluasan kebebasan substantif masyarakat. BLT dalam konteks ini bukan sekadar transfer uang, melainkan sarana memperluas kebebasan ekonomi masyarakat miskin dari kelaparan, keterbatasan akses kebutuhan dasar, dan kerentanan terhadap guncangan. Hal ini sejalan dengan temuan Alatas et al. (2021) yang menunjukkan bahwa transfer tunai berkontribusi pada peningkatan kapabilitas rumah tangga miskin dalam menghadapi guncangan ekonomi. Malika et al. (2024) menambahkan bahwa BLT harus dipandang sebagai komponen integral dalam sistem jaminan sosial yang berkelanjutan.

Efektivitas BLT sangat bergantung pada kualitas administrasi. Weber (1947) menekankan pentingnya birokrasi rasional dengan data yang tertib dan seragam sebagai prasyarat efektivitas kebijakan. Ketika format data tidak seragam antar desa, prinsip rasionalitas birokrasi tidak tercapai. Penelitian Bani et al. (2023) menegaskan bahwa lemahnya koordinasi administratif dan ketidakseragaman data menjadi hambatan utama distribusi BLT. Dari sisi makroekonomi, Keynes (1936) menekankan peran kebijakan fiskal ekspansif dalam menjaga permintaan agregat. BLT sebagai bentuk transfer tunai terbukti meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan menjaga konsumsi rumah tangga, sebagaimana ditunjukkan oleh Suryahadi et al. (2020). Musgrave (1959) menambahkan bahwa BLT mencerminkan fungsi distribusi dan stabilisasi dalam ekonomi publik, yang relevan dengan upaya pemerintah mengurangi ketimpangan dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktik di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, proses pendataan BLT masih menghadapi berbagai kendala. Ketidakseragaman format antar desa dan

kelurahan menyulitkan proses kompilasi, sementara banyak data yang tidak lengkap, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan informasi jenis kelamin, menghambat validasi. Selain itu, keterlambatan atau belum adanya penyerahan dokumen pelaporan dari aparat desa/kelurahan kepada pihak kecamatan menyebabkan proses pendataan tidak maksimal. Data dari desa yang belum menyerahkan dokumen tidak dapat diinput ke sistem Excel, sehingga menimbulkan kekosongan dan berisiko mengurangi akurasi serta efektivitas pendataan. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana menyusun data BLT desa dan kelurahan secara seragam dan akurat agar proses administrasi di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih tertib serta memberikan dasar yang kuat bagi distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran.

Kecamatan Nainggolan memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang khas. Wilayah ini terletak di bagian barat Pulau Samosir dengan luas sekitar 71 km², terdiri atas 13 desa dan 2 kelurahan, serta dihuni oleh sekitar 13 ribu jiwa dengan kepadatan rendah. Struktur sosial masyarakat masih didominasi oleh komunitas adat Batak Toba yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan solidaritas. Ekonomi lokal bertumpu pada sektor pertanian, hortikultura, dan perikanan darat di Danau Toba, sementara perdagangan tradisional dan sektor pariwisata mulai berkembang seiring meningkatnya kunjungan wisatawan. Letak geografis di tepi Danau Toba memberi keunggulan strategis sebagai jalur penghubung antarwilayah sekaligus kawasan dengan potensi wisata alam dan budaya. Potensi sosial dan ekonomi ini menjadi modal penting dalam mendukung perbaikan sistem pendataan BLT yang lebih partisipatif dan terintegrasi.

Penyusunan data BLT desa dan kelurahan di Kecamatan Nainggolan ditujukan untuk menata administrasi agar lebih tertib, meningkatkan transparansi, serta memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran. Kegiatan ini sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan bantuan sosial di tingkat lokal. Dengan dukungan literatur mutakhir, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas administrasi desa dan kelurahan serta mendukung keberlanjutan sistem jaminan sosial.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada praktik administrasi pendataan BLT di tingkat kecamatan. Data yang digunakan merupakan data sekunder administratif berupa dokumen fisik daftar penerima BLT yang

diserahkan oleh desa/kelurahan kepada pihak kecamatan. Dokumen tersebut kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel untuk memastikan keteraturan dan konsistensi format.

Tahapan penerapan dilakukan secara sistematis. Pertama, data ditata ulang dan divalidasi dengan memeriksa kelengkapan identitas penerima, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan jenis kelamin, serta memperbaiki format agar seragam. Kedua, data dari berbagai desa/kelurahan digabungkan dan distandarisasi sehingga terbentuk satu basis data kompilasi yang konsisten dan siap digunakan untuk analisis administratif. Ketiga, dokumen kompilasi digunakan sebagai dasar monitoring administratif oleh pihak kecamatan untuk mengevaluasi kepatuhan desa terhadap format baku, kelengkapan data, dan ketepatan waktu pelaporan.

Keberhasilan kegiatan diukur secara deskriptif melalui persentase kelengkapan data (NIK dan jenis kelamin terisi), keseragaman format antar desa, serta ketepatan waktu pelaporan. Secara kualitatif, keberhasilan dinilai melalui evaluasi administratif terhadap dokumen kompilasi, sehingga dapat diketahui sejauh mana data telah memenuhi standar kelengkapan dan konsistensi. Dengan penerapan metode ini, kegiatan menghasilkan dokumen monitoring yang akuntabel dan mendukung peningkatan efisiensi serta transparansi pengelolaan data BLT di Kecamatan Nainggolan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan magang yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Nainggolan tidak hanya menjadi sarana pembelajaran praktis, tetapi juga memberikan kontribusi akademik dalam meningkatkan kualitas administrasi di tingkat desa/kelurahan. Nilai tambah kegiatan ini tampak dalam tiga dimensi: administratif, berupa penerapan format baku yang meningkatkan konsistensi dan transparansi data; kebijakan, berupa tersedianya dokumen monitoring yang dapat digunakan kecamatan untuk menilai kepatuhan desa/kelurahan; serta sosial, berupa dorongan bagi aparatur desa untuk lebih disiplin dalam menyusun laporan. Dengan demikian, kegiatan magang ini berkontribusi pada penguatan tata kelola bantuan sosial yang akuntabel, meskipun belum menyentuh aspek distribusi langsung karena keterbatasan waktu pelaksanaan (Weber, 1947; Dwiyanto, 2006).

Secara jangka pendek, kegiatan ini mendorong aparatur desa untuk lebih disiplin dalam mengisi data sesuai format baku, sehingga kualitas data meningkat dan risiko salah

sasaran dapat diminimalkan. Secara jangka panjang, kegiatan ini diharapkan membentuk budaya administrasi yang profesional dan akuntabel di tingkat desa/kelurahan, sekaligus membuka peluang pengembangan sistem informasi berbasis digital yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Weber (1947) mengenai birokrasi rasional yang mensyaratkan data tertib dan konsisten, serta gagasan Suryahadi et al. (2020) tentang pentingnya digitalisasi sistem informasi sosial untuk memperkuat efisiensi administrasi publik.

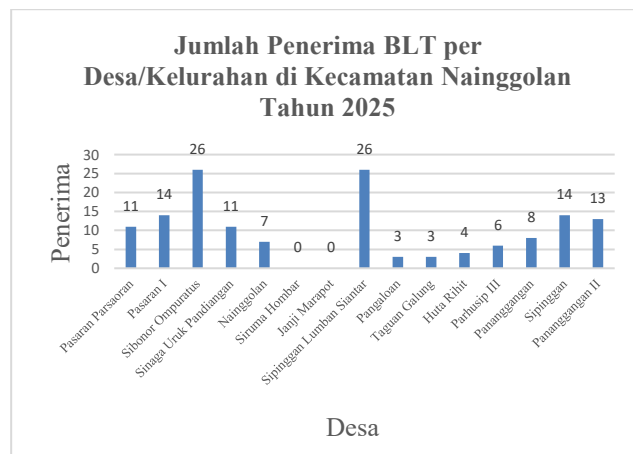
Penyusunan data BLT di Kecamatan Nainggolan dilakukan melalui proses kompilasi dengan memanfaatkan dokumen fisik yang diserahkan oleh desa/kelurahan kepada pihak kecamatan. Dokumen tersebut berisi daftar penerima BLT, namun sering kali tidak seragam dalam format dan tidak lengkap dalam pencantuman identitas, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan jenis kelamin. Karena sifatnya sebagai data sekunder administratif, mahasiswa magang tidak melakukan pengumpulan data primer di lapangan, melainkan bertugas menata, memvalidasi, dan menggabungkan dokumen yang sudah ada. Kondisi ini menimbulkan kesulitan teknis, terutama dalam menyatukan format data yang berbeda antar desa, sehingga proses penggabungan harus dilakukan secara manual. Dari total 15 desa/kelurahan, data berhasil dihimpun dari 13 desa, sementara 2 desa belum menyerahkan laporan. Penyusunan berbasis dokumen sekunder ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi bantuan sosial di tingkat kecamatan, sekaligus memperlihatkan variasi kepatuhan administrasi antar desa. Hal ini sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2006) yang menegaskan bahwa kinerja birokrasi publik sangat ditentukan oleh kemampuan administrasi dalam menyediakan data yang konsisten.

Meskipun terdapat keterbatasan, hasil kompilasi dokumen fisik dari desa/kelurahan tetap memberikan gambaran nyata mengenai variasi kepatuhan administrasi. Luaran ini dapat dimanfaatkan oleh pihak kecamatan sebagai alat monitoring untuk menilai desa yang belum menyerahkan data, sekaligus sebagai dasar untuk membangun kesadaran aparat desa mengenai pentingnya kelengkapan dan keseragaman format. Dengan demikian, meskipun kegiatan magang hanya berfokus pada pengolahan dokumen sekunder, hasilnya tetap berkontribusi pada penguatan konsistensi administrasi dan efisiensi pengelolaan informasi bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Weber (1947) yang menekankan pentingnya birokrasi rasional berbasis data

tertib, serta Dwiyanto (2006) yang menegaskan bahwa kinerja birokrasi publik sangat bergantung pada kemampuan administrasi dalam menyediakan data yang konsisten.

Indikator ketercapaian tujuan pada tahap awal dapat dilihat dari tersusunnya data BLT dalam format yang lebih rapi dan terdokumentasi. Walaupun waktu magang relatif singkat sehingga hasil jangka panjang belum dapat diamati, data yang dihimpun telah memberi manfaat praktis bagi pihak kecamatan. Data tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring untuk menilai kelengkapan data, sekaligus sebagai dasar untuk menghubungi desa/kelurahan yang belum menyerahkan laporan. Tolak ukur keberhasilan kegiatan ditunjukkan melalui adanya data yang lebih valid, meningkatnya kesadaran aparatur desa tentang pentingnya pencantuman NIK dan jenis kelamin, serta tersedianya dokumentasi berupa tabel distribusi penerima BLT (Malika et al., 2024).

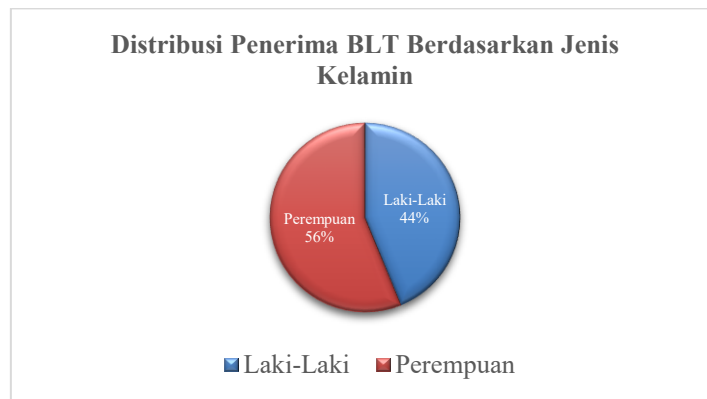
Manfaat praktis ini semakin terlihat karena data yang tersusun tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga sebagai acuan yang dapat dipakai langsung dalam proses evaluasi di tingkat kecamatan. Dengan adanya format yang lebih seragam, pihak kecamatan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai kepatuhan desa terhadap standar pelaporan, sekaligus mengidentifikasi kelemahan yang masih muncul dalam pencatatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kegiatan magang berlangsung dalam waktu terbatas, hasil yang diperoleh sudah memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki keteraturan administrasi dan menyediakan dokumen yang siap digunakan untuk tindak lanjut administratif.



Gambar 1. Jumlah Penerima BLT per Desa/Kelurahan di Kecamatan Nainggolan Tahun 2025

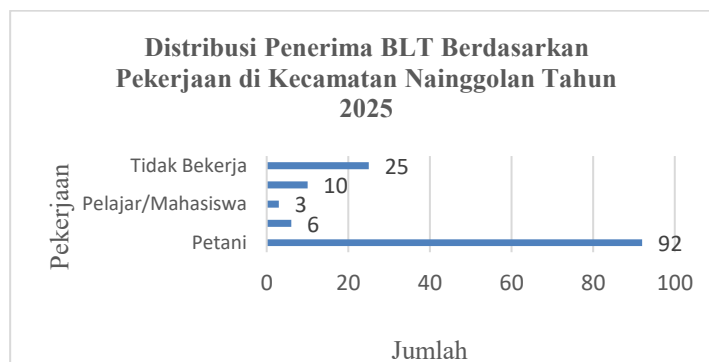
Sumber: Data BLT Kecamatan Nainggolan Tahun 2025 (data diolah)

Tabel ini menunjukkan variasi jumlah penerima antar desa. Dua desa, yaitu Siruma Hombar dan Janji Marapot, tercatat nol karena belum menyerahkan data. Hal ini menegaskan adanya disparitas kepatuhan administrasi antar desa. Desa yang tidak menyerahkan data memperlihatkan lemahnya kapasitas administratif. Kondisi ini sejalan dengan Weber (1947) yang menekankan pentingnya birokrasi rasional berbasis data tertib, serta Titmuss (1974) yang menegaskan bahwa kepatuhan administrasi merupakan syarat pemerataan distribusi kesejahteraan.



Gambar 2. Distribusi Penerima BLT Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025
Sumber: Data BLT Kecamatan Nainggolan Tahun 2025 (data diolah)

Tabel ini memperlihatkan bahwa jumlah penerima perempuan (82 orang) lebih tinggi dibanding laki-laki (64 orang). Dominasi penerima perempuan menunjukkan bahwa BLT berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial bagi kelompok yang lebih rentan secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan Titmuss (1974) bahwa kebijakan sosial harus diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan, serta Sen (1999) melalui konsep Development as Freedom yang menegaskan bahwa bantuan sosial memperluas kebebasan substantif perempuan, terutama dalam mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan ekstrem.



Gambar 3. Distribusi Penerima BLT Berdasarkan Pekerjaan di Kecamatan Nainggolan Tahun 2025

Sumber: Data BLT Kecamatan Nainggolan Tahun 2025 (data diolah)

Tabel ini menunjukkan dominasi penerima dari sektor agraris, khususnya petani (92 orang). Kehadiran kelompok tidak bekerja (25 orang) memperlihatkan BLT sebagai jaring pengaman sosial. Keynes (1936) menegaskan bahwa intervensi fiskal pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat, sementara Musgrave (1959) menekankan fungsi distribusi fiskal untuk mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, BLT di Kecamatan Nainggolan tidak hanya memperkuat sektor agraris, tetapi juga melindungi kelompok paling rentan.

Hasil kompilasi dokumen fisik menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam pencatatan kategori pekerjaan. Beberapa desa menggunakan istilah berbeda untuk pekerjaan yang secara substansi sama, misalnya petani pemilik lahan, petani penyewa, atau buruh tani. Bahkan ada yang mencatat pekerjaan sebagai “lainnya”, padahal tetap terkait dengan aktivitas agraris. Perbedaan istilah ini mencerminkan belum adanya standarisasi format pelaporan, sehingga berpotensi menimbulkan bias dalam analisis data. Fenomena ini menegaskan perlunya penerapan format baku yang konsisten agar data pekerjaan dapat diinterpretasikan secara lebih akurat. Dengan standarisasi, kecamatan dapat mengelompokkan seluruh kategori tersebut ke dalam klasifikasi “sektor agraris”, sehingga analisis lebih representatif dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Keynes (1936) yang menekankan peran intervensi fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui dukungan terhadap sektor produktif, serta Musgrave (1959) yang menegaskan fungsi distribusi fiskal untuk mengurangi ketimpangan.

Penerapan format baku sederhana yang dipadukan dengan Microsoft Excel terbukti efektif dalam menata ulang dokumen fisik menjadi basis data yang lebih tertib dan terdokumentasi. Pendekatan ini sesuai dengan kondisi aparatur desa yang masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan aplikasi digital kompleks, sehingga proses validasi, penggabungan, dan analisis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Namun, kendala tetap muncul berupa perbedaan format antar desa dan ketidaklengkapan pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang berfungsi sebagai identitas tunggal penerima bantuan. Kekurangan NIK ini berpotensi menimbulkan masalah validitas data dan risiko salah sasaran (Alatas et al., 2021).

Kesulitan utama muncul pada tahap awal, terutama dalam menyatukan format data yang berbeda dan meningkatkan pemahaman aparat desa mengenai pentingnya kelengkapan informasi. Kompleksitas bertambah karena dokumen fisik yang diserahkan sering kali tidak seragam dan tidak lengkap. Meski demikian, hasil kompilasi tetap memberikan gambaran nyata mengenai variasi kepatuhan antar desa dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar monitoring administratif. Hal ini sejalan dengan Grindle (1997) yang menekankan bahwa kapasitas kelembagaan lokal sangat menentukan kualitas implementasi kebijakan.

Ke depan, sistem pendataan BLT dapat dikembangkan melalui integrasi dengan basis data kependudukan nasional berbasis NIK, penerapan aplikasi digital sederhana di tingkat desa, serta peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan berkelanjutan. Agar data tetap mutakhir dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, diperlukan evaluasi berkala yang berbasis bukti. Dengan penguatan tersebut, pendataan BLT tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mendukung efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas program bantuan sosial (Bani et al., 2023).

KESIMPULAN

Penyusunan data BLT di Kecamatan Nainggolan memperlihatkan bahwa kegiatan ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi administrasi bantuan sosial. Proses kompilasi dokumen fisik yang ditata ulang, divalidasi, digabungkan, dan distandarisasi menghasilkan data yang lebih tertib dan akuntabel. Namun, masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki agar tata kelola bantuan sosial semakin efektif. Selain itu, kegiatan ini membuka peluang pengembangan sistem administrasi berbasis digital di tingkat desa, sehingga pengelolaan bantuan sosial dapat lebih modern, transparan, dan berkelanjutan.

Data BLT yang semula tidak seragam dan tidak lengkap berhasil ditata ulang menggunakan Microsoft Excel, sehingga menghasilkan dokumen kompilasi yang lebih rapi, terdokumentasi, dan akuntabel. Proses ini memperlihatkan bahwa dengan langkah sederhana, data yang sebelumnya sulit diintegrasikan dapat disusun menjadi satu basis informasi yang konsisten.

Penerapan format baku sederhana terbukti efektif dalam meningkatkan konsistensi data antar desa/kelurahan. Hasil kompilasi juga memperlihatkan variasi kepatuhan administrasi, di mana beberapa desa belum menyerahkan data. Kondisi ini memberi gambaran nyata tentang kapasitas administratif yang berbeda-beda, sekaligus menjadi alat monitoring bagi pihak kecamatan.

Kelebihan kegiatan ini terletak pada kemampuannya memperkuat akuntabilitas administrasi publik. Data yang lebih tertib mendorong kesadaran aparatur desa mengenai pentingnya kelengkapan dan keseragaman informasi, sehingga risiko salah sasaran dapat diminimalkan. Selain itu, kegiatan ini juga memberi manfaat praktis berupa dokumen monitoring yang dapat digunakan untuk evaluasi berkelanjutan.

Kekurangan yang ditemukan adalah ketidakseragaman format antar desa, ketidaklengkapan pencantuman NIK, serta dokumen fisik yang sering tidak lengkap. Perbedaan istilah dalam pencatatan kategori pekerjaan juga menimbulkan bias dalam analisis data. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran aparatur desa terhadap pentingnya administrasi tertib dan konsisten masih rendah, sehingga perlu adanya pembinaan lebih lanjut.

Peluang pengembangan ke depan mencakup integrasi pendataan BLT dengan basis data kependudukan nasional berbasis NIK, penerapan aplikasi digital sederhana di tingkat desa, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan administrasi dan digitalisasi. Evaluasi berkala berbasis bukti juga diperlukan agar data tetap mutakhir dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga tata kelola bantuan sosial dapat lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir. (2024). *Kabupaten Samosir dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Samosir.

Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., Purnamasari, R., & Wai-Poi, M. (2021). Self-targeting: Evidence from a field experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 129(3), 795–825.

Bani, R., Sari, D., & Pratama, Y. (2023). Administrative challenges in social assistance distribution during the COVID-19 pandemic. *Journal of Social Policy and Administration*, 57(4), 612–628.

Brennan, M. A., & Israel, G. D. (2008). The power of community. *Community Development*, 39(1), 82–97.

- Bhuvanewari, K., Geethalakshmi, V., Lakshmanan, A., Srinivasan, R., & Sekhar, N. U. (2013). The impact of El Nino/ Southern Oscillation on hydrology and rice productivity in the Cauvery Basin, India: Application of the soil and water assessment tool. *Weather and Climate Extremes*, 2, 39–47.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard Institute for International Development. Retrieved January 15, 2025, from <https://www.hks.harvard.edu/publications/getting-good-government> (hks.harvard.edu in Bing)
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 239/HUK/2025 tentang pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest, and money*. London: Macmillan.
- Malika, S., Putri, A., & Nugroho, B. (2024). Cash transfer as part of social security system: Evidence from Indonesia. *Asian Journal of Social Science Research*, 14(2), 115–130.
- McKibbin, B. (2007). *Deep economy: The wealth of communities and the durable future*. New York: Times Books/Henry Holt and Co.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. New York: McGraw-Hill.
- Pigg, K. E., & Bradshaw, T. K. (2003). Catalytic community development: A theory of practice for changing rural society. In D. L. Brown & L. E. Swanson (Eds.), *Challenges for rural America in the twenty-first century* (pp. 385–396). University Park, PA: Pennsylvania State University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The impact of COVID-19 outbreak on poverty: Evidence from Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175–192.
- Titmuss, R. M. (1974). *Social policy: An introduction*. London: Allen & Unwin.
- U.S. Census Bureau. (2000). *State and Country QuickFacts*. Washington, D.C.: United States Bureau of the Census. Retrieved November 7, 2008, from <http://quickfacts.census.gov/qfd>
- Banggai, Kabupaten. 2024. “Penguatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai.” 4(2): 83–87.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Vestikowati, Endah, Kiki Endah, Eet Saeful Hidayat, and Administrasi Pemerintahan. 2020. "Abdimas Galuh." 2(September)

Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Hadi, S., & Wahyudi, A. (2019). Penguatan kapasitas aparatur desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2)

Mahdias, H. Z., Aryadita, H., & Wicaksono, S. A. (2019). Pengembangan Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat Untuk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Berbasis Android. *jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 3(1)

Maulidiah, S. (2014). Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Bandung: CV.

Indra Prahasta. Moeleong, L. J. (2007). In Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

Mustafa, D. (2014). Birokrasi Pemerintahan Edisi Revisi. Bandung: ALFABETA.

Ndraha, T. (2011). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Norris, D. F. & Reddick, C. G. 2013. Local E- Government in te United States: Transformation of Incremental Change? *Public Administration Review*, 73

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2018). Reformasi administrasi publik dan tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 45–58. Republik Indonesia. (2014).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. (2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri. UNDP. (1997).

Governance for Sustainable Human Development. New York: United Nations Development Programme. Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Rangkuti, F. (2005). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rustanto, B. (2015). Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya Offset.

- Subarsono, A. (2012). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. Tambunan M Rudi, 2013. Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure. Penerbit:Maiesta. Jakarta.
- Victor M Situmorang, C. S. (1994). Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yati, M. F. (2019). Audit Sistem Informasi Pada Sistem E-Government dengan Menggunakan Framwork Cobit 5 (Studi Pada: Sistem Terintegrasi untuk Pengaduan dan Aspirasi(SIGAP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- Lestari., Bandiyah., Wiwin. (2014). Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis E-Government (Studi kasus pengelolaan pengaduan masyarakat online Kota Denpasar pada Dinas Komunikasi dan Informatika). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Udayana.
- M. Hardjana. 2003. Komunikasi Intrapersonal dan Komunikasi Interpersonal . Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- M. Andriansyah. (2015). Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian dan Analisa. Jakarta: FISIP Universitas
- Moestopo Beragama. Atmoko, Tjipto. 2012. Standar Operasional Prosedur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Unpad: Bandung.
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization*. New York: Free Press.